

Bab IV Gambaran Umum Kasus Gampong Lambung, Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan salah satu wilayah tingkat dua di Provinsi Aceh, dan sekaligus menjadi ibukota provinsi. Kota Banda Aceh merupakan kota yang mengalami dampak sangat besar akibat bencana gempa dan tsunami. Untuk itu, upaya-upaya penanggulangan bencana terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait khususnya pemerintah Kota Banda Aceh. Salah satunya yaitu upaya dalam menerapkan konsep tangguh terhadap bencana, atau *resilient city*, dan merujuk kepada butir-butir kesepakatan dalam *Hyogo Framework* dan *Sendai Framework* Tahun 2015 - 2030. *Smart city* juga merupakan salah satu konsep yang telah diterapkan di Kota Banda Aceh secara bertahap

Gampong Lambung merupakan salah satu desa yang berhasil bangkit dan menerapkan prinsip-prinsip *smart city* dan resiliensi dalam menjalani kehidupan kemasyarakatan, baik pemerintahan, interaksi sosial, kondisi lingkungan, dan aktivitas lainnya. Bab ini akan menjelaskan gambaran wilayah Kota Banda Aceh dan Gampong Lambung sejak sebelum terjadi bencana hingga pascabencana, baik dari sisi kondisi geografi, demografi, fisik wilayah, sosial, ekonomi, infrastruktur, pemerintahan, kebencanaan serta konsep *smart city* dan resiliensi yang telah diterapkan.

IV.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Gambaran umum Kota Banda Aceh dideskripsikan melalui penjabaran tentang kondisi geografi, kondisi fisik wilayah, kondisi demografi, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi pemerintahannya.

IV.1.1 Kondisi Geografi

Kondisi geografi Kota Banda Aceh secara astronomis terletak pada 05°16'15" - 05°36'16" Lintang Utara dan 95°16'15" - 95°22'35" Bujur Timur. Secara geografis, Kota Banda Aceh berada pada bagian paling utara dan paling barat dari Pulau Sumatera, Indonesia. Wilayah pesisir di Kota Banda Aceh dibagi menjadi dataran

pesisir pantai utara (mulai dari Kecamatan Kuta Alam sampai dengan sebagian Kecamatan Kuta Raja) dan pesisir pantai wilayah barat (sebahagian Kecamatan Meuraxa). Posisi ini memperlihatkan bahwa Kota Banda Aceh sebagian besar berada di wilayah pesisir, sehingga rentan terhadap bencana tsunami.

Batas Kota Banda Aceh terdiri dari: bagian wilayah utara berbatasan dengan Selat Malaka, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, bagian barat berbatasan dengan Samudera Hindia, dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar. Selat Malaka dan Samudera Hindia merupakan wilayah perairan lepas yang juga secara tidak langsung (dipisah oleh laut) juga berbatasan dengan negara-negara di Selatan Benua Asia, seperti India, Myanmar, Thailand, dan Malaysia.

Kondisi ini secara tidak langsung juga memberikan banyak potensi bagi Kota Banda Aceh, baik dari segi ekonomi, kemudahan akses, dan kemudahan membuka diri bagi dunia luar, khususnya pascabencana mega tsunami pada 26 Desember 2004. Kota Banda Aceh dapat lebih mengenalkan dan menumbuhkan citra dan *image* yang baik bagi dunia internasional serta kemungkinan yang lebih besar dalam menjalin kerja sama dan berkolaborasi di segala bidang.

Sejak terbentuknya, Kota Banda Aceh terdiri dari 4 kecamatan yaitu Meuraxa, Baiturrahman, Kuta Alam dan Syiah Kuala. Berdasarkan Perda Kota Banda Aceh Nomor 8 tahun 2000, Kota Banda Aceh dimekarkan dari 4 kecamatan menjadi 9 kecamatan. Kota Banda Aceh juga terdiri atas 17 mukim (mukim adalah wilayah administrasi berdasarkan hukum adat yang disusun dari beberapa gampong/desa), dan 70 gampong (istilah yang digunakan di Provinsi Aceh untuk wilayah desa).

Saat ini, administrasi Kota Banda Aceh telah terjadi penambahan desa menjadi 90 gampong. Hal ini terjadi karena adanya pemekaran beberapa gampong di Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh mempunyai luas sebesar 61,36 km² atau 6.136 ha dengan persentase luasan wilayah untuk masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada Tabel IV.1 berikut.

Tabel IV.1 Luas kecamatan dan persentase terhadap luasan wilayah Kota Banda Aceh 2021 (BPS Kota Banda Aceh, 2021).

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Luas Wilayah dari Total
1	Kec. Meuraxa	7,26 km ²	11,83 %
2	Kec. Jaya Baru	3,78 km ²	6,16 %
3	Kec. Banda Raya	4,79 km ²	7,81 %
4	Kec. Baiturrahman	4,54 km ²	7,40 %
5	Kec. Lueng Bata	5,34 km ²	8,70 %
6	Kec. Kuta Alam	10,05 km ²	16,38 %
7	Kec. Kuta Raja	5,21 km ²	8,49 %
8	Kec. Syiah Kuala	14,24 km ²	23,21 %
9	Kec. Ulee Kareng	6,15 km ²	10,02 %
Kota Banda Aceh		61,36 km ²	100,00 %

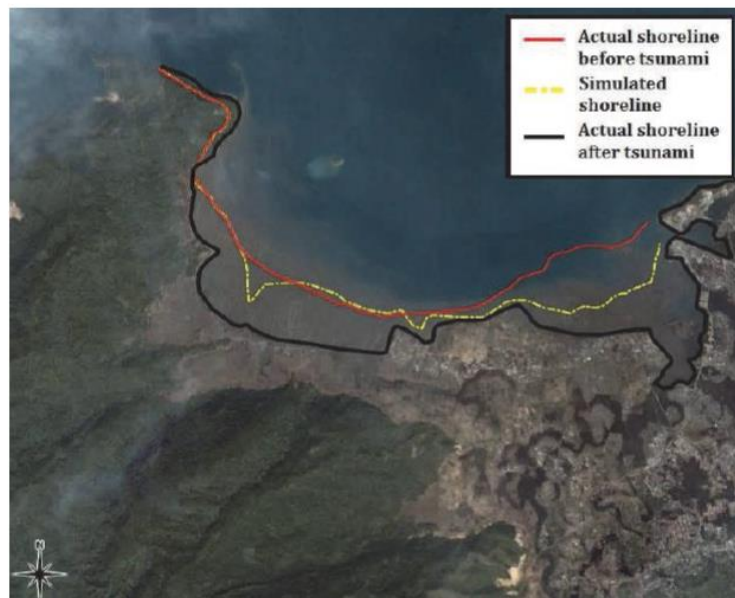
Tabel IV.1 menunjukkan Kecamatan yang mempunyai luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Syiah Kuala dengan total luasan 14,24 km² (23,21% dari luas Kota Banda Aceh). Kemudian untuk kecamatan dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Jaya Baru yaitu sebesar 3,78 Km² (6,16% dari luas Kota Banda Aceh). Lebih detail dapat dilihat pada Gambar IV.1.

Peta administrasi Kota Banda Aceh menunjukkan Gampong Lambung dan Kecamatan Meuraxa (garis putus-putus) merupakan salah satu daerah pesisir di Kota Banda Aceh yang berbatasan secara langsung dengan Selat Malaka dapat dilihat pada Gambar IV.1. Kecamatan Meuraxa memiliki luas 726 Ha terdiri dari 16 gampong, 64 dusun, dan 2 kemukiman. Salah satu Gampong yang menjadi *vokal point* di pesisir Kecamatan Meuraxa adalah Gampong Lambung. Hal ini dikarenakan keberhasilan Gampong Lambung dalam kegiatan *Land Consolidation* (LC) atau konsolidasi lahan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi dan juga menjadi *pilot project* kampung iklim tahun 2018 oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Banda Aceh. Tidak ada yang terlalu berbeda dari kondisi geografis Kota Banda Aceh dari sebelum tsunami hingga pascabencana tsunami.

Sesar Semangko (*Semangko Fault*) melewati Pulau Sumatera. Sesar ini memanjang dari Banda Aceh sampai ke Lampung. Dampak dari keberadaan sesar ini menyebabkan daerah yang dilalui olehnya menjadi rentan akan gempa dan longsor.

Gelombang tsunami 26 Desember 2004 terjadi karena adanya patahan sesar menyebabkan banyak perubahan pada wilayah pesisir Aceh, beberapa aspek yang berubah seperti garis pantai, tata guna lahan, pemukiman masyarakat dan infrastruktur. Garis pantai Aceh mengalami perubahan yang signifikan, perubahan garis pantai tersebut disebabkan karena gelombang tsunami mampu membawa sedimen dalam jumlah yang besar dan pada rentang waktu yang singkat, gelombang tsunami juga mampu mengikis (erosi) daratan dalam waktu singkat pula.

Gelombang tsunami mampu memberikan efek erosi yang sangat besar pada wilayah yang mempunyai *slope* landai sedangkan wilayah yang disedimentasi oleh gelombang tsunami adalah wilayah yang mempunyai *slope* curam atau wilayah yang garis pantainya berada dekat dengan bukit. Pesisir Aceh yang terkena gelombang tsunami pada umumnya mengalami erosi, besar dan tingginya erosi pada suatu pesisir sangat tergantung dari *slope* daerah tersebut (Syamsidik, dkk., 2016).



Gambar IV.2 Perubahan garis pantai Teluk Ulee Lheue Banda Aceh setelah tsunami (Syamsidik dkk., 2016).

Kota Banda Aceh memiliki 7 (tujuh) sungai yang mengalir seluruh wilayah dan berguna sebagai daerah aliran sungai (DAS) serta sumber air baku, aktivitas perikanan, dan lain sebagainya. Kondisi air tanahnya berjenis air asin, payau dan tawar. Persebaran wilayah air tanah asin terdapat pada wilayah utara dan timur kota sampai ke wilayah bagian tengah. Untuk air payau ada pada wilayah bagian tengah kota membujur dari timur hingga barat.



Gambar IV.3 Kondisi fisik wilayah yang terdampak karena tsunami dan kondisi setelah masa rehabilitasi dan rekonstruksi selesai (Google Earth, 2006; Google Earth 2016).

Terakhir, untuk daerah dengan air tanah jenis tawar berada di bagian selatan yang membentang dari Kecamatan Baiturrahman sampai dengan Kecamatan Jaya Baru dan termasuk Kecamatan Lueng Bata, Kecamatan Ulee Kareng, dan Banda Raya.

Dari foto udara, dapat dilihat kondisi fisik Kota Banda Aceh setelah terkena bencana mega tsunami dan kondisi sepuluh tahun pascabencana. Gambar nomor satu dan dua adalah kondisi sesaat setelah bencana (masa tanggap darurat) dan kondisi setelah sepuluh tahun (masa pascabencana) di kawasan pusat kota Banda Aceh yaitu kawasan lapangan Blang Padang dan Taman Sari, yang berfungsi sebagai *civic square* atau wilayah pusat kegiatan warga Kota Banda Aceh, seperti kegiatan olahraga, upacara, hiburan, dan rekreasi.

Di sekitar kawasan ini banyak terdapat gedung-gedung utama pemerintah kota, seperti kantor pemerintahan, rumah sakit, sekolah, rumah dinas, museum, penginapan, dsb. Begitu pula pada gambar nomor tiga dan empat, memperlihatkan kondisi fisik di wilayah pantai Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa, yang menyebabkan adanya perubahan garis pantai, jembatan yang putus, hilangnya pelabuhan, dan fungsi perumahan permukiman yang awalnya padat menjadi kosong.

IV.1.3 Kondisi Demografi

Dari data BPS, jumlah penduduk Kota Banda Aceh sebelum terjadi tsunami, pada tahun 2003 sebanyak 230.828, dan tahun 2004 meningkat menjadi 239.146 jiwa, dengan jumlah kepadatan penduduk 38 jiwa/ha. Pada saat terjadi bencana gempa dan tsunami, jumlah penduduk berkurang secara signifikan menjadi 177.881 orang dengan kepadatan penduduk sebesar 29 jiwa/ha (data survey tahun 2005). Hal ini disebabkan sebanyak 61.265 penduduk tewas atau hilang pascabencana.

Penduduk Kota Banda Aceh kembali pulih dengan cepat, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pertumbuhan jiwa yang cukup signifikan, survei tahun 2013 menunjukkan jumlah penduduk Kota Banda Aceh menjadi 249.282 orang, dan

tahun 2015 menjadi 254.848 jiwa, dengan jumlah kenaikan rata-rata 2,67 persen per tahun, dan tingkat kepadatan mencapai 41 jiwa/ha.



Gambar IV.4 Kondisi demografi jumlah penduduk Kota Banda Aceh berdasarkan kecamatan sebelum dan sesudah tsunami (Arif, 2014).

Dari gambar IV.4 dapat dilihat bahwa akibat bencana gempa dan tsunami, penurunan jumlah penduduk di Kecamatan Meuraxa terlihat cukup signifikan, khususnya di Gampong Lambung. Berdasarkan data BPS, Gampong lambung sebelum tsunami memiliki penduduk sebanyak 1180 jiwa, dan setelah bencana menurun drastis menjadi 238 jiwa.

Paska bencana tsunami, data terakhir jumlah penduduk Kota Banda Aceh (BPS, 2022) adalah sebanyak 255.029 jiwa dengan kepadatan penduduk 43 jiwa/Ha. Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan cukup berimbang, terdiri dari: laki-laki 128.532 jiwa dan perempuan 126.497 jiwa. Penduduk Kota Banda Aceh juga didominasi penduduk dengan usia muda, yang disebabkan oleh fungsi Kota Banda Aceh sebagai pusat pendidikan dan jasa. Terlepas dari jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk Kota Banda Aceh dari tahun 2010 sampai tahun 2020 adalah sebesar 1,21%. Apabila dilihat per kecamatan, laju pertumbuhan penduduk terbesar di Kota Banda Aceh terdapat di kecamatan lokasi studi, yaitu kecamatan Meuraxa sebesar 4,84 persen. Hal ini memperlihatkan kondisi pertumbuhan yang cukup signifikan pascabencana tsunami.

IV.1.4 Kondisi Sosial

Kondisi sosial akan dilihat dari segi pendidikan, kesehatan, dan tingkat kemiskinan. Pada bidang pendidikan, sejak sebelum tsunami Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota provinsi Aceh telah menjadi pusat pendidikan. Terdapat dua perguruan tinggi sebagai pusat pengetahuan, yaitu Universitas Syiah Kuala (USK) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry yang menjadi kebanggaan penduduk Kota Banda Aceh. Selain PTN, juga terdapat 36 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang salah satunya berdasarkan *Webometrics Ranking of World Universities* yang dikutip dari laman kemendikbud merupakan salah satu PTS terkemuka, yaitu Universitas Muhammadiyah Aceh.

Pascatsunami, salah satu upaya pemerintah Kota Banda Aceh dalam menumbuhkan tingkat kualitas pendidikan dan jumlah pendidikan tinggi adalah dengan membangun perguruan tinggi vokasi Kampus Politeknik Aceh. Kampus ini dibangun atas kerja sama banyak pihak, yaitu: pemerintah Kota Banda Aceh, pemerintah provinsi Aceh, Kementerian Pendidikan, BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh), dan pihak-pihak NGO dan swasta seperti USAID, Chevron Corporation. Pascatsunami universitas swasta di Kota Banda Aceh tidak langsung menjadi pasif dan berhenti aktivitasnya, namun semakin berkembang pesat, dan bahkan bertambah kampus-kampus baru lainnya. Paling tidak terdapat 5 universitas swasta baru di Kota Banda Aceh, sehingga jumlahnya menjadi 41 PTS.

Sejak sebelum tsunami, secara umum keinginan penduduk Kota Banda Aceh untuk terus belajar dan partisipasi dalam kegiatan belajar cukup tinggi. Hal ini dilihat dari jumlah sekolah dan jumlah murid mulai dari SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi, sehingga sejak awal telah menjadi kota pusat pendidikan di Provinsi Aceh. Perkembangan pascatsunami, di tahun 2021, tingkat pendidikan penduduk kota yang mampu membaca dan menulis juga meningkat menjadi 99,84% dan menulis dalam huruf lainnya sebanyak 45,02 % (BPS Kota Banda Aceh, 2021). Angka partisipasi murni yakni sebanyak 82% untuk tingkat Sekolah Menengah Atas, 85% untuk Sekolah Menengah Pertama, dan 99% untuk Sekolah Dasar. Angka ini menunjukkan adanya proporsi penduduk terhadap kelompok umur jenjang

pendidikan tertentu yang masih melanjutkan pendidikan dan sesuai dengan kelompok umurnya.

Ketersediaan fasilitas kesehatan di kota Banda Aceh terdiri dari: rumah sakit umum sebanyak 13 unit, rumah sakit khusus 4 unit, puskesmas 12 unit, klinik/balai kesehatan sebanyak 22 unit, posyandu 96 unit, dan pondok bersalin desa (polindes) sebanyak 22 unit. Indikator lainnya juga dapat dilihat dari jumlah ketersediaan tempat tidur dari keseluruhan unit kesehatan adalah sebanyak 2.179 unit tempat tidur, serta tenaga kesehatan yang paling banyak adalah perawat dengan jumlah 1089 orang dan diikuti dengan jumlah bidan 321 orang, serta dokter sebanyak 198 orang.

Rumah Sakit utama di Kota Banda Aceh adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA), rumah sakit ini banyak dibantu dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami tahun 2005 oleh beberapa badan donor NGO luar negeri dan negara-negara donor seperti Jerman dan Australia (Tempo, 2005). Saat ini RSUD dr. Zainoel Abidin telah menjadi rumah sakit negeri kelas A dan meraih akreditasi paripurna dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada tahun 2015, dengan kapasitas 940 tempat tidur dan juga ditetapkan sebagai rujukan tertinggi di Provinsi Aceh atau sebagai rumah sakit pusat.

Rumah Sakit yang dikelola langsung oleh pemerintah Kota Banda Aceh adalah RSUD Meuraxa. rumah sakit ini pertama kali dibangun di Kecamatan Meuraxa pada tahun 1997. Pascagempa dan tsunami 2004, RSUD Meuraxa mengalami kerusakan dan kehancuran yang parah, sehingga berdampak terhadap kehilangan tenaga-tenaga medis, seluruh sarana dan prasarana yang ada, serta dokumen-dokumen penting lainnya. Selanjutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Banda Aceh menjadikan lokasi RSUD Meuraxa Ulee Lheue sebagai lokasi memorial kuburan massal korban gempa dan tsunami.

Faktor sosial tentu tidak terlepas dari faktor keagamaan, masyarakat Aceh sangat kental akan nuansa religiusnya. Meskipun didominasi oleh nuansa syariat Islam,

tidak membuat warga sulit dalam menerima perbedaan, bahkan warga non muslim seperti Kristen, Budha dan Hindu, dapat bersatu dalam keberagaman dengan toleransi yang kuat. Hal ini ditambah lagi ketika ratusan negara donor dan pihak LSM asing yang datang ke Kota Banda Aceh tidak merasakan adanya kesulitan dalam berinteraksi, dan warga yang tinggal di permukiman baru memiliki toleransi yang cukup tinggi meski berada dalam keberagaman (Zalmita dkk., 2020).



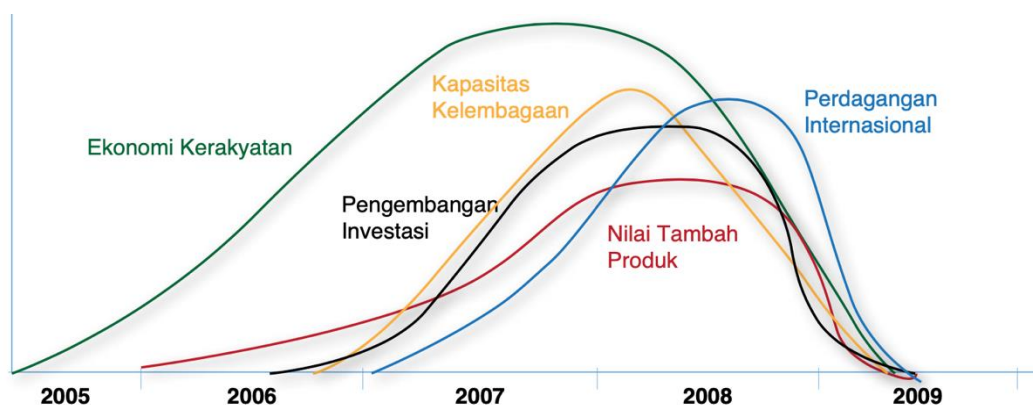
Gambar IV.5 Gedung RSUD Meuraxa sebelum tsunami (foto atas); Puing-puing gedung dan lansekapnya sekarang telah beralih fungsi menjadi Taman Memorial Kuburan Massal Tsunami (foto bawah) (RSUD Meuraxa, 2020; Koleksi Pribadi, 2022).

IV.1.5 Kondisi Ekonomi

Episode baru perekonomian di Kota Banda Aceh justru dimulai pascagempa bumi dan tsunami melanda, bukan malah sebaliknya. Kehancuran, kehilangan dan banyak kerugian yang dialami warga kota bukan malah membuat mereka terpuruk, justru mereka bertekad untuk segera bangkit dan pulih. Dahsyatnya bencana gempa

dan tsunami pada saat itu menyebabkan terpuruknya perekonomian Kota Banda Aceh, dan Provinsi Aceh pada umumnya. Namun, banyaknya bantuan baik dari pemerintah pusat dan provinsi-provinsi lain, LSM lokal dan Asing, serta lembaga donor lain yang banyak berpartisipasi dan membantu masyarakat baik melalui program padat karya (*cash work*) maupun melalui bantuan perbaikan aset produktif masyarakat yang telah hancur dan akhirnya dapat membaik dalam waktu yang tidak terlalu panjang (Basri, 2009).

Pasca bencana, selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi, sebanyak 155.182 tenaga kerja telah dilatih dan 195.726 UKM (Usaha Kecil Menengah) telah menerima bantuan di Provinsi Aceh. Pemulihan ekonomi dilakukan melalui strategi dan kebijakan antara lain yaitu: melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dengan melibatkan langsung masyarakat dan manfaatnya dapat langsung dirasakan; peningkatan produksi dan nilai tambah produk UMKM yang menjadi salah satu tulang punggung tumbuhnya perekonomian pascabencana; melakukan pemulihan dan peningkatan aktivitas perdagangan; meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi dan usaha melalui perbaikan sarana prasarana, infrastruktur, modal usaha, bantuan alat-alat produktif, dan yang paling utama adalah membangun SDM; mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya investasi melalui kemudahan dan pelayanan bagi investor, penyediaan informasi potensi investasi, kerja sama dengan pengusaha lokal, serta kemudahan perizinan usaha.



Gambar IV.6 Hal-hal yang difokuskan pada kebijakan pengembangan perekonomian (Basri, 2009).

Lima hal yang menjadi fokus pembangunan ekonomi pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi diterapkan dalam rentang waktu lima tahun (2005-2009). Strategi dan kebijakan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghidupkan kembali perekonomian dan penguatan nilai-nilai kearifan lokal. Pengadaan sarana dan prasarana ekonomi serta peningkatan kualitas SDM difokuskan pada periode tahun 2005-2006. Peningkatan produksi, penguatan kelembagaan, usaha menumbuhkan UKM dan sentra-sentra ekonomi dibangun pada periode 2007-2008. Terakhir, pada periode 2008-2009 fokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui penguatan pasar-pasar lokal untuk dapat menuju pasar internasional (Basri, 2009).

Bila melihat kondisi sebelum tsunami, pada rentang tahun 2000-2004, inflasi Kota Banda Aceh paling tinggi terjadi pada tahun 2001 yakni sebesar 16,67 persen. Namun tahun 2006 (pascatsunami) angka inflasi Kota Banda Aceh meningkat secara drastis hingga 41,11 persen, dan yang berdampak pada inflasi tertinggi sebesar 11,24 persen adalah pada kelompok bahan makanan. Survei tahun 2005-2006 (persis setelah kejadian tsunami) BPS Kota Banda Aceh merilis hasil survei bahwa kondisi perekonomian mengalami penurunan secara drastis. Buruknya kondisi perekonomian saat itu ditandai dengan tingginya angka inflasi. Pascabencana gempa dan tsunami, banyak infrastruktur yang menghubungkan kota Banda Aceh dengan wilayah-wilayah lain menjadi putus dan lumpuh. Akibatnya, cadangan kebutuhan makanan menjadi sangat terbatas dan sulit didapat. Hal ini menjadikan permintaan yang tinggi tetapi persediaan terbatas, sehingga harga-harga barang, khususnya harga bahan makanan melonjak tinggi.

Kondisi perekonomian Kota Banda Aceh setelah proses rehabilitasi dan rekonstruksi selesai, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Setelah sepuluh tahun tsunami berlalu, angka inflasi kembali mengalami penurunan, tahun 2015 sebesar 1,27 persen dan tahun 2016 sebesar 3,13 persen. Hal ini dapat memperlihatkan bahwa kondisi perekonomian Kota Banda Aceh telah kembali stabil. Hal ini tidak terlepas dari adanya keberhasilan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat melangsungkan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005, serta ditambah dengan adanya UU No.11/2006 tentang

Pemerintahan Aceh. Hal ini terus mendorong keamanan Kota Banda Aceh kembali normal pasca konflik yang berkepanjangan, dan diharapkan menjadi peluang yang besar bagi kebangkitan perekonomian Kota Banda Aceh.

IV.1.6 Kondisi Pemerintahan

Pada masa darurat, yaitu pada tiga bulan pertama sejak kejadian bencana, seluruh sektor kelembagaan, pelayanan publik, dan pemerintahan masih lumpuh dan tidak ada aktivitas. Hal ini disebabkan oleh banyak pejabat dan aparatur pemerintah yang menjadi korban tsunami, salah satunya yaitu Pejabat (Pj.) Wali Kota Banda Aceh. Pada pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi NAD, sebanyak 3 orang pejabat eselon II, 31 orang eselon III, dan 125 eselon IV meninggal dunia. Jumlah aparatur yang meninggal sebanyak 2.992 orang, dan 2.274 orang dilaporkan hilang.

Begitu pula halnya yang terjadi di kabupaten dan kota lainnya, aparatur negara yang menjadi korban terbanyak berada di wilayah yang terkena langsung dampak gelombang tsunami antara lain di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Aceh Besar. Selain pemerintah daerah, aparatur pemerintah di sejumlah instansi vertikal juga menjadi korban seperti aparatur Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri.

Kondisi daerah yang lumpuh menyebabkan pemerintah pusat mengambil alih pemerintahan Aceh agar dapat hidup kembali, untuk itu Departemen Dalam Negeri mengirimkan ke Aceh sebanyak 74 orang pejabat eselon I-IV Depdagri, 307 pegawai, dan 352 Nindya praja dengan tujuan agar dapat memulai kembali kegiatan birokrasi. Aparatur tersebut bertugas di kantor gubernur, DPRD, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa-desa.

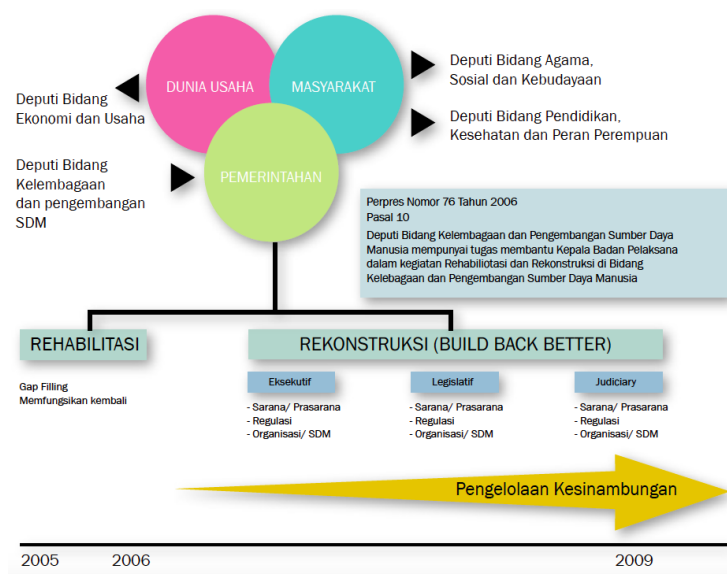
Pada masa pemulihan ini, pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 16 April 2005, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2005, mendirikan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara (BRR). BRR bertugas mengkoordinasi dan menjalankan program pemulihan

Aceh-Nias yang dilandaskan pada partisipasi aktif masyarakat setempat. Salah satunya yaitu memperkuat fundamen pelayanan masyarakat, yaitu pemerintah kota/provinsi yang lumpuh total pada saat bencana.

BRR mengambil alih koordinasi dan mulai membenahi pemerintah dengan melakukan koordinasi dengan kepala pemerintahan daerah provinsi, yaitu Gubernur NAD dalam rangka menata kembali pemerintahan berdasarkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Upaya lain dilakukan dengan mengangkat pegawai baru di lingkungan Pemda untuk mengisi kekosongan aparatur yang meninggal atau hilang, mengganti peralatan kantor, sarana, dan prasarana yang hilang, membenahan administrasi kependudukan warga, serta menyusun rencana untuk membangun kembali lembaga- lembaga pemerintahan daerah dan kantor- kantor instansi vertikal yang hancur.

BRR memainkan dua peran utama, yaitu sebagai koordinator dan juga sebagai pelaksana pembangunan. BRR juga melakukan koordinasi bantuan kemanusiaan dari berbagai donor, komunitas internasional, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta melaksanakan pembangunan multisektor dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tugas lainnya yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan pengembangan SDM.

Keberhasilan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tentu sangat dipengaruhi oleh pihak-pihak pemberi bantuan, baik dari dalam maupun luar negeri. Selama masa pemulihan, terdapat 992 organisasi yang terlibat, yang berasal dari 50 negara. Bentuk-bentuk pendanaan selain dari pemerintah Indonesia, juga didapat dari donor bilateral, donor multilateral, dan LSM. Para aktor pemberi dana tersebut menyerahkan bantuan melalui mekanisme penyaluran dana yang berbeda-beda dan berada di bawah pengawasan lembaga satuan anti korupsi (SAK).



Gambar IV.7 Konsep tata kelola tugas-tugas kedepuitan pada tiga bidang di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR, 2009).

Setelah proses rehabilitasi dan rekonstruksi hampir berakhir, maka dilakukan proses transisi dan pengelolaan aset pemulihan pasca BRR, sehingga kemampuan aparatur beserta kelembagaan yang ada harus siap dan kuat. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih siap, mandiri, dan berintegritas tinggi, sehingga penguatan kelembagaan, penguatan aparatur pemerintahan, dan para aktor yang terlibat harus menjadi prioritas dan fondasi dasar bagi keberlanjutan pembangunan kedepan.

IV.2 Gambaran Umum Gampong Lambung

Secara geografis, Kecamatan Meuraxa dengan ibukota kecamatan berada di Ulee Lheue, berada di sebelah barat Kota Banda Aceh. Kecamatan ini memiliki luas 726 Ha dengan jumlah gampong sebanyak 16 gampong. Sebelah utara Kecamatan Meuraxa langsung berbatasan dengan Selat Malaka. Begitu pula dengan Gampong Lambung yang langsung berbatasan dengan wilayah pelabuhan dan Pantai Ulee Lheue. Letak Kecamatan Meuraxa dan Gampong Lambung ini menyebabkan kerusakan yang luar biasa pada saat tsunami terjadi. umumnya wilayah perumahan dan permukiman hancur dan hampir semua rata dengan tanah, bahkan warga selamat yang kembali ke gampong, sulit menandai rumah mereka karena tidak ada penandaan apapun yang dapat mereka gunakan.

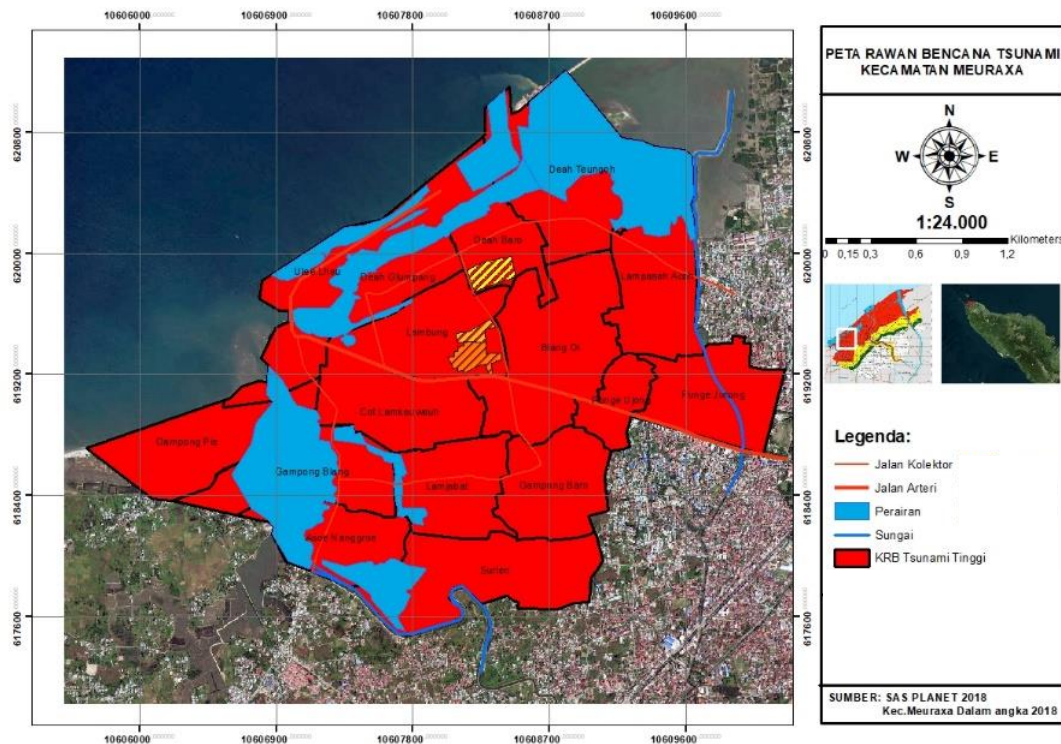
Gampong lambung yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Meuraxa memiliki luas 85 Ha dengan ketinggian wilayah berada 1 meter di atas permukaan laut. Pascatsunami berbagai fasilitas untuk mitigasi bencana alam tersedia di Gampong Lambung, antara lain yaitu: Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) khusus tsunami, Sistem peringatan dini bencana alam, perlengkapan keselamatan bagi warga, rambu-rambu kebencanaan dan jalur evakuasi bencana, dan bangunan mitigasi evakuasi bencana tsunami (*escape building*). Pada *escape building* disediakan stok bahan makanan apabila kemungkinan terjadi bencana seperti gempa, tsunami, ataupun banjir besar. Setiap periode stok bahan makanan selalu diperiksa tanggal kadaluarsanya agar tetap bisa dikonsumsi dengan aman. Gedung ini juga memiliki fasilitas helipad dan dapat menampung hingga 500 orang di dalamnya. Gedung ini dibangun dengan teknologi tahan gempa hingga 9-10 SR dan setiap tahunnya digunakan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan *tsunami drill*.

Berdasarkan BPS Kota Banda Aceh Tahun 2003, Gampong Lambung memiliki jumlah penduduk sebanyak 1180 jiwa. Kemudian pada tahun 2005 jumlah penduduk menurun drastis menjadi 283 jiwa. Begitu pula halnya dengan kondisi demografi di Kecamatan Meuraxa yang menurun drastis dari 34.592 jiwa pada tahun 2004, pascatsunami turun menjadi 2.221 jiwa pada tahun 2005. Akibat tsunami Gampong Lambung kehilangan 897 jiwa. Beberapa nelayan selamat karena ketika bencana datang, mereka sedang berada di atas kapal (15 orang termasuk Pak Geuchik Gampong Lambung). Korban lain yang selamat disebabkan karena sedang berkeliling kota Banda Aceh setelah gempa bumi (sebelum tsunami) untuk melihat kondisi sekitar akibat gempa dan karena ingin mengunjungi keluarga dan sanak saudara. Selain itu, beberapa warga juga selamat karena sedang keluar daerah untuk keperluan belajar, menjalankan usaha, dan keperluan urusan lainnya (Ichsan, 2011).

Penduduk Gampong Lambung pada tahun 2008 mulai meningkat sebesar 420 jiwa. Pertumbuhan penduduk terus meningkat, pascabencana tsunami dan masa

rehabilitasi dan rekonstruksi, BPS mencatat tahun 2011 jumlah penduduk di Gampong Lambung sebanyak 510 jiwa. Saat ini, berdasarkan data penduduk yang tercatat pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Gampong Lambung Tahun 2018, jumlah penduduk Gampong Lambung sekitar 630 jiwa.

Pada dokumen RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029, Gampong Lambung merupakan wilayah yang berada di zona merah, bermakna memiliki tingkat risiko tsunami tinggi (Gambar IV.8). Posisi Gampong Lambung dekat dengan Samudera Hindia yang berbatasan dengan Gampong Deah Glumpang di Utara, Gampong Blang Oi di Timur, Gampong Cot Lamkuweuh di Selatan, dan Gampong Ulee Lheue di sebelah Barat. Gampong Lambung terdiri atas empat dusun, yakni: Dusun Melati, Dusun Dahlia, Dusun Mawar, dan Dusun Seulanga.



Gambar IV.8 Peta Rawan Bencana Tsunami Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh (SAS Planet, 2018; Kec. Meuraxa dalam angka 2018; dan hasil analisis, 2020).

Jika ditinjau dari kondisi fisik dasar, tampak terlihat lahan terbangun dan non terbangun di Gampong Lambung pada masa sebelum tsunami pada Juni 2004. Peta kondisi Gampong Lambung pada masa sebelum tsunami (2000-awal 2004) yang dapat dilihat pada Gambar IV.9 di bawah ini.



Gambar IV.9 Peta Kondisi Fisik Gampong Lambung Juni 2004 (Google Earth, 2022).

Peta kondisi Gampong Lambung sesaat sebelum terjadi bencana masih didominasi oleh bangunan rumah dan tambak. Namun, kondisi tersebut seketika hancur ketika terjadi tsunami yang menyebabkan runtuhnya semua bangunan di Gampong Lambung sehingga tampak lahan kosong yang mendominasi (Gambar IV.10).

Setelah seluruh bangunan di Gampong Lambung mengalami kehancuran yang masif dan rata dengan tanah. Pemerintah Gampong Lambung melakukan program kegiatan konsolidasi lahan dan merencanakan *village planning* melalui pengaturan kembali blok-blok peruntukan lahan sehingga lebih teratur, jaringan jalan lebih tertata, jalan utama sebagai jalur mitigasi menjadi lebih lebar dan mudah diakses, serta pemanfaatan tata guna lahan yang lebih optimal. Upaya konsolidasi lahan dan penyusunan *village planning* dilakukan seiring dengan kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi yang dilakukan oleh BRR. Kini kondisi tata guna lahan di Gampong Lambung tampak lebih teratur seperti pada Gambar IV.11.



Gambar IV.10 Peta Kondisi Fisik Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa pada Februari 2005 (Google Earth, 2022).



Gambar IV.11 Peta Kondisi Fisik Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa Tahun 2009 (Google Earth, 2022).

Pada tahun 2009, distribusi penggunaan lahan Gampong Lambung terdiri dari 29 hektar pemukiman dan fasilitas umum, 15 hektar Kawasan Mangrove, dan 8 hektar areal tambak ikan dan udang Gampong Lambung. Penggunaan lahan pada akhir

Hingga saat ini Gampong Lambung telah memiliki fasilitas pendidikan SD dan SMP, fasilitas kesehatan seperti Posyandu, Meunasah sebagai fasilitas keagamaan, tempat bermusyawarah, dan pendidikan, kantor desa dan balai desa, lapangan olah raga, dan beberapa fasilitas pendukung lainnya.

IV.3 Gambaran Kebencanaan Kota Banda Aceh

Berdasarkan data indeks rawan bencana Indonesia, Kota Banda Aceh termasuk dalam peringkat 15 (lima belas) besar dengan kelas rawan bencana tinggi. Hal tersebut ternyata sejalan dengan Kajian Risiko Bencana (KRB) Aceh tahun 2016-2020 yang diterbitkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh yang menyatakan bahwa Kota Banda Aceh termasuk dalam potensi banjir kelas tinggi. Untuk mengatasi rawan bencana, BPBD Kota Banda Aceh melakukan pemetaan terhadap kerawanan bencana alam yang berpotensi dapat terjadi dan yang pernah terjadi di Kota Banda Aceh, antara lain:

Tabel IV.2 Jenis bencana yang rawan berdasarkan kecamatan di Kota Banda Aceh (RPJMD Kota Banda Aceh 2012-2017, 2017).

No	Kecamatan	Rawan terhadap Bencana
1	Meuraxa	Gempa, tsunami, abrasi erosi, angin puting beliung, gelombang pasang, kekeringan
2	Banda Raya	Gempa, banjir genangan, angin puting beliung, gelombang pasang, kekeringan
3	Syiah Kuala	Gempa, tsunami, abrasi erosi, angin puting beliung, gelombang pasang, kekeringan
4	Jaya Baru	Gempa, tsunami, abrasi erosi, angin puting beliung, gelombang pasang, kekeringan
5	Kuta Alam	Gempa, tsunami, abrasi erosi, kekeringan
6	Baiturrahman	Gempa, tsunami, angin puting beliung, kekeringan
7	Kuta Raja	Gempa, tsunami, abrasi erosi, gelombang pasang, kekeringan
8	Ulee Kareng	Gempa, kekeringan
9	Lueng Bata	Gempa, banjir genangan, kekeringan

Dari sejumlah bencana yang terjadi, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah menyiapkan hasil kajian bencana prioritas yang dianalisis berdasarkan penyatuan parameter tingkat risiko bencana dan kecenderungan terjadinya bencana.

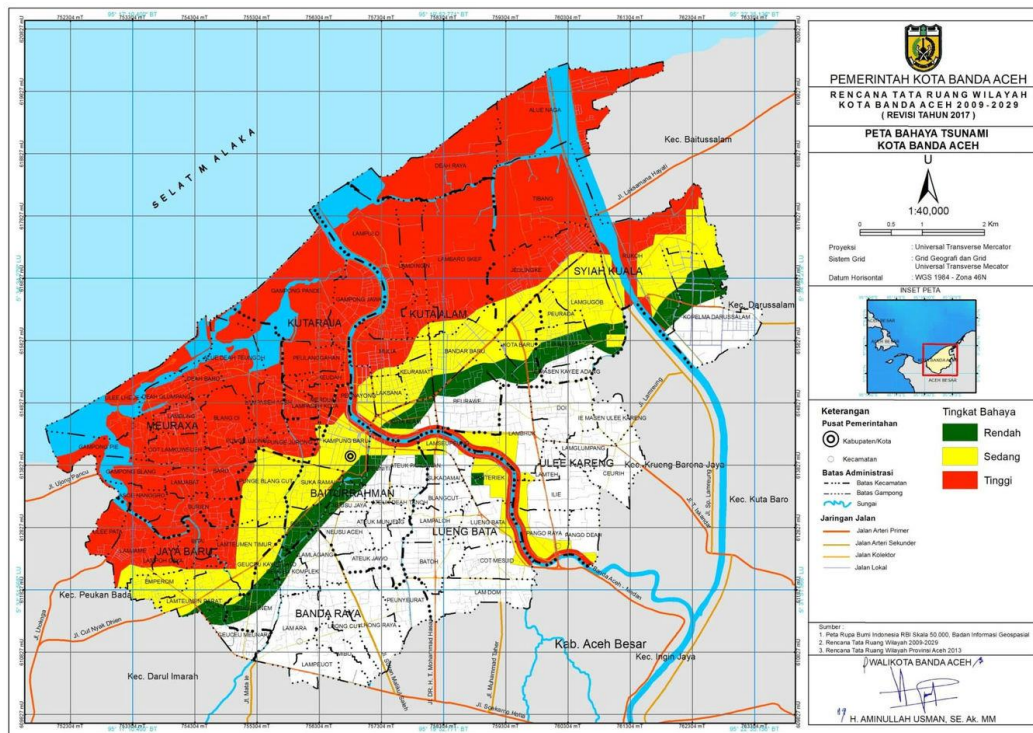
Pada analisis ini hanya terdapat pengelompokan bencana-bencana prioritas, untuk kelompok bencana non prioritas tetap dilakukan upaya-upaya penanganan, namun dilakukan secara bertahap. Berdasarkan jenis bahaya bencana prioritas yang ada, maka berikut ini tabel bencana prioritas Kota Banda Aceh yang ditinjau dari tingkat risiko, tingkat kecenderungan, dan tingkat prioritasnya.

Tabel IV.3 Tingkat risiko, kecenderungan, dan prioritas bencana Kota Banda Aceh (RPB Kota Banda Aceh 2016 – 2021, 2016).

No.	Jenis Bahaya	Tingkat Risiko	Kecenderungan	Prioritas
1	Banjir	Sedang	Tetap	2
2	Tsunami	Tinggi	Tetap	1
3	Gempa bumi	Tinggi	Tetap	1
4	Cuaca ekstrem	Rendah	Meningkat	2
5	Epidemi	Sedang	Tetap	2
6	Kebakaran gedung dan pemukiman	Rendah	Meningkat	2

Pengelompokan bencana prioritas dibagi lagi menjadi prioritas 1 dan 2, dengan tingkat risiko dan kecenderungan yang berbeda. Bencana yang termasuk dalam Prioritas 1 yaitu bencana gempa dan tsunami dengan tingkat risiko tinggi dan kecenderungan tetap, sehingga bencana gempa dan tsunami menjadi fokus utama dan menjadi prioritas dalam penyediaan pendanaan dalam perencanaan 5 tahun kedepan. Bencana yang termasuk dalam Prioritas 2 yaitu banjir, cuaca ekstrem, kebakaran gedung dan pemukiman, serta epidemi yang memiliki tingkat risiko sedang dan rendah dengan kecenderungan yang tetap dan meningkat.

Gambar IV.13 menunjukkan daerah yang berisiko terhadap bencana tsunami Kota Banda Aceh. Kecamatan yang paling terdampak dan memiliki luas ancaman terbesar adalah kecamatan Syiah Kuala. Pada peta tersebut terdapat tiga tingkat ancaman, yaitu tingkat tinggi, tingkat sedang, dan tingkat rendah. Selanjutnya pada tingkat ancaman tinggi, dilakukan pembagian terhadap 3 zona, yaitu: zona 1, zona 2, zona 3, dan zona aman. Zona 1 sampai dengan zona 3 adalah daerah yang terdampak tsunami, sedangkan zona aman adalah zona yang tidak terdampak oleh bencana tsunami atau zona bebas tsunami.



Gambar IV.13 Peta bahaya tsunami Kota Banda Aceh yang terdapat dalam Qanun nomor 2/2018, tingkat bahaya ditunjukkan oleh warna: merah (tingkat bahaya tinggi), kuning (tingkat bahaya sedang), dan hijau (tingkat bahaya rendah) (Pemerintah Kota Banda Aceh, 2018).

Berdasarkan potensi bencana yang ada, gempa dan tsunami adalah salah satu bencana yang paling berdampak besar terhadap kehilangan dan kerugian, seperti korban jiwa, korban luka-luka, dan korban harta benda. Berdasarkan pedoman kajian risiko tsunami atau *Tsunami Risk Assessment Guideline (TRA)* yang dikeluarkan oleh BNPB, ketinggian maksimum genangan untuk kota Banda Aceh adalah 12 meter.

Berdasarkan konsensus yang dihasilkan, parameter tsunami untuk Kota Banda Aceh ditambahkan dengan menciptakan peta landasan tsunami dan berdasar pada pengkajian indeks bencana tsunami, total wilayah yang terdampak akibat tsunami adalah 29,57% dari luasan daerah. Untuk gambaran detail, berikut tabel luasan bencana tsunami per kecamatan di Kota Banda Aceh.

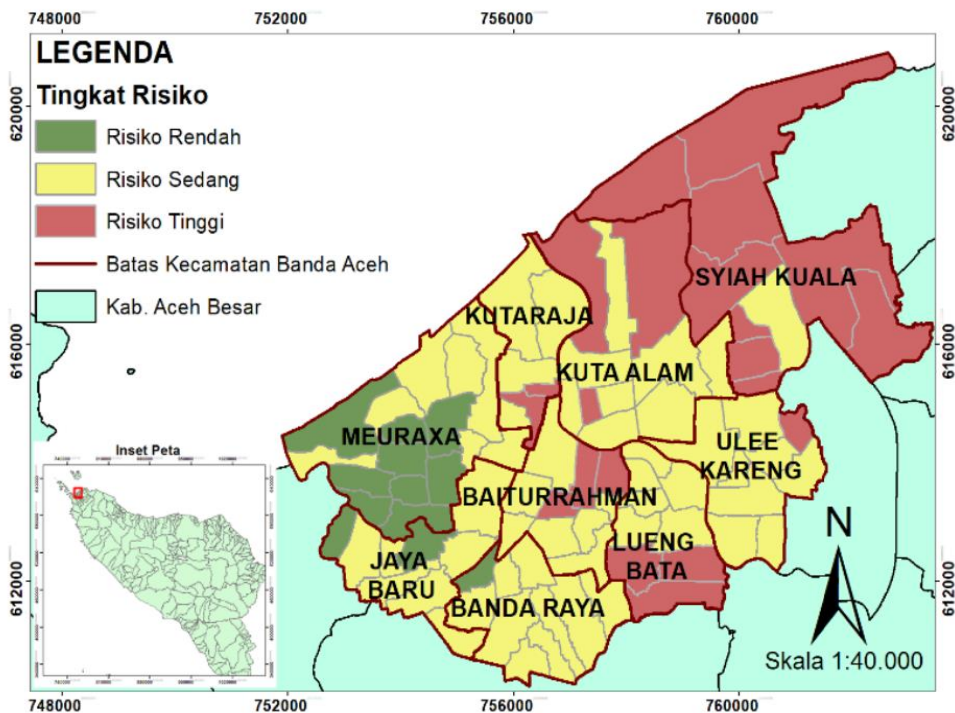
Tabel IV.4 Luasan bencana tsunami per kecamatan (RPB Kota Banda Aceh 2016 – 2021, 2016).

Kecamatan	Luas Ancaman (Ha)	Tingkat Ancaman Dominan
Baiturrahman	82,45	Tinggi
Banda Raya	-	-
Jaya Baru	285,23	Tinggi
Kuta Alam	610,16	Tinggi
Kuta Raja	349,49	Tinggi
Lueng Bata	73,67	Rendah
Meuraxa	868,02	Tinggi
Syah Kuala	1099,68	Tinggi
Ulee Kareng	69,68	Rendah
Total Luas	3438,38	Tinggi



Gambar IV.14 Gambar atas menunjukkan luasan wilayah yang terdampak akibat tsunami di Kota Banda Aceh (tahun 2005). Gambar bawah menunjukkan kondisi Kota Banda Aceh setelah 10 tahun pascatsunami (tahun 2014) (Majalah Tempo, 2014).

Kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut memiliki dampak yang hampir merata ke seluruh wilayah kecamatan. Hal ini disebabkan oleh potensi gelombang *run up* tsunami yang tinggi dan landainya kondisi topografi Kota Banda Aceh.



Gambar IV.15 Peta resiko gempa bumi Kota Banda Aceh (Serlia dkk., 2021).

Peta di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar wilayah utara dan wilayah timur laut yaitu kawasan kecamatan Syiah Kuala dan kecamatan Kuta Alam memiliki tingkat risiko tinggi. Secara keseluruhan, tingkat risiko gempa bumi per kelurahan di Kota Banda Aceh sebagian besar wilayah yang ada memiliki tingkat risiko sedang yang berjumlah 57 kelurahan (63,33%), selanjutnya disusul oleh tingkat risiko tinggi dengan jumlah 21 kelurahan (23,33%), dan paling sedikit memiliki kawasan dengan tingkat risiko rendah dengan jumlah 12 kelurahan (13,33%) (Serlia dkk., 2021).

Selain dari daftar gempa di atas, Aceh juga pernah dilanda beberapa tsunami yang sangat kuat. Hal ini terekam pada sedimen berlapis yang ada di Gua Lhoong Kabupaten Aceh Besar dan di karang-karang yang ada di Kabupaten Simeulue. Peneliti dari Universitas Syiah Kuala (USK) dan *Earth Observatory of Singapore* (EOS) mengungkapkan bahwa telah terjadi 11 kali tsunami besar di Aceh dalam 7.500 tahun terakhir. Jejak *paleotsunami* atau tsunami purba tersebut terekam pada sedimen gua yang tumpang-tindih, berwarna coklat terang dan coklat gelap.

Tabel IV.5 Gempa di Aceh dan Dampak Kerusakannya (Supartoyo, 2014).

No	Waktu	Pusat	Mag	Dampak
1	1907	Pulau Simeulue	-	Tsunami pulau simeulue
2	23/08/1936	Banda Aceh	7,3 Ms	Kerusakan bangunan di Banda Aceh, Lhoksukon, dan Lhokseumawe
3	2/04/1964	Banda Aceh	6,5 Mag	± 30%-40% bangunan tembok rusak
4	12/04/1967	Lhokseumawe - Sigli	6,1 Mag	Terjadi Tsunami, Likuifaksi & longsoran di Sigli
5	20/06/1967	Kuta Cane	6,1 Mag	Kerusakan bangunan pemerintahan di kabupaten Kutacane & bandara Pinangsore di kabupaten Sibolga.
6	4/04/1983	Banda Aceh	6,6 Mag	Kerusakan bangunan di Kota
7	15/11/1990	Blang Kejeren	6,8 Mag	Terjadi longsor, retakan tanah, dan likuifaksi
8	2/11/2002	Utara Singkil - Simeulue	6,5 SR	Getaran gempa hingga Barat Selatan, Singkil dan Medan
9	22/01/2003	Peureulak, Aceh Timur	5,7 SR	31 bangunan rusak berat dan 26 bangunan rusak ringan
10	26/12/2004	Barat Daya Kota Banda Aceh	9 Mw	Gempa bumi terbesar IV di dunia sejak thn 1900 (USGS). Terjadi tsunami merusakkan ± 85% kota Banda Aceh
11	5/10/2005	Cot Glie, Aceh Besar	5,7 Mw	73 rumah penduduk, 2 masjid, 1 SD Lamkin dan 1 puskesmas rusak ringan di Kec. Cot Glie.
12	1/02/2006	Simeulue	5,9 Mw	Beberapa bangunan mengalami kerusakan di Pulau Simeulue.
13	21/02/2008	Barat Laut Simeulue	7,3 SR	3 orang meninggal, 25 orang luka-luka, beberapa bangunan dan rumah penduduk mengalami kerusakan.
14	28/01/2010	Takengon	5,5 SR	602 bangunan mengalami kerusakan berat dan ringan di Aceh Tengah
15	7/04/2010	Tenggara Sinabang	7,2 SR	Tsunami (tinggi run up < 50 cm) di P. Tuanku dan Labuan Bajo, Kec Simeulue Timur
16	9/05/2010	Meulaboh	7,2 SR	Beberapa bangunan mengalami kerusakan dan ringan. Tsunami tinggi run up < 50 cm.
17	6/09/2011	Singkil	6,7 SR	3 orang meninggal, 1 orang luka berat, 6 orang luka ringan, 2.281 bangunan rusak di Singkil.
18	11/04/2012	Simeulue	8,5 SR	Tsunami di desa Lhok Sito, Kec. Alafan, tinggi run up ± 60 cm.
19	2/06/2012	Trumon, Aceh Selatan	6,6 SR	Kerusakan bangunan di Subulussalam dan Aceh Singkil
20	22/01/2013	Pidie	5,9 Mw	Retakan jalan dan 20 lokasi longsor di jalan Tangse – Mane.
21	22/10/2013	Pidie	5,6 SR	Jembatan rusak di Kec. Tangse
22	2/07/2013	Aceh Tengah	6,1 Mw	Jalan Bireuen – Takengon tertutup longsor

Siklus Tsunami dan Sejarah Aceh



Gambar IV.16 Siklus tsunami di Aceh dan bukti kehadiran tsunami sejak ribuan tahun lalu pada lapisan sedimen yang diendapkan di Gua Lhoong, Aceh Besar (Majalah Tempo, 2014).

Dari beberapa gempa yang pernah terjadi belakangan ini, gempa yang paling dahsyat dan menyebabkan tsunami adalah gempa tanggal 26 Desember 2004. Gempa ini berkekuatan 9,2 SR dan korban yang ditimbulkan akibat bencana adalah hingga lebih 200.000 jiwa. Gempa dan tsunami ini termasuk ke dalam salah satu bencana terbesar sepanjang sejarah di Dunia (NSF, 2005). Tsunami yang disebabkan oleh gempa datang dengan ketinggian hingga 30 meter, Kota Banda Aceh saat itu rusak dan hancur, seluruh listrik padam, infrastruktur rusak dan tidak dapat digunakan, hingga akhirnya hampir seluruh bagian kota menjadi lumpuh total.

Berdasarkan pengalaman bencana ini, pemerintah Kota Banda Aceh mulai meningkatkan kesadarannya terhadap bencana besar, khususnya gempa dan tsunami. Salah satu upaya pengurangan risiko bencana yang disiapkan oleh pemerintah yaitu menyediakan empat bangunan penyelamat sebagai upaya mitigasi tsunami (*escape building*) yaitu di Gampong Alue Deah, Deah Gelumpang, Lambung dan Gampong Pie. Dari empat *Escape Building* tersebut, tiga di antaranya dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh

dan satu bangunan penyelamat yang terletak di Gampong Pie saat ini digunakan oleh TDMRC Unsyiah (Pusat Kajian Bencana Gempa dan Tsunami).

Tidak hanya itu, pengurangan risiko bencana juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintah dalam melakukan penanggulangan bencana, serta peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana, memasuki masa darurat bencana, dan kegiatan pascabencana, agar masyarakat cepat kembali bangkit dari bencana yang menimpanya. Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan adalah uji sistem peringatan dini (*early warning system*) dan pelatihan menghadapi bencana gempa dan tsunami pada fasilitas-fasilitas publik, seperti di sekolah, perkantoran, rumah sakit, dan lain sebagainya. Hingga saat ini terdapat tiga unit sistem peringatan dini di Kota Banda Aceh, yaitu di Gampong Blang Oi Kecamatan Meuraxa, di Gampong Lampulo dan Gampong Bandar Baru yang terletak di Kecamatan Kuta Alam (BPBD, 2017).

IV.4 Konsep *Smart City* Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh telah berdiri sejak 12 April 1205 M, dan kini telah berusia 813 tahun. Hingga kini, Kota Banda Aceh memiliki fungsi yang cukup beragam, selain sebagai pusat pemerintahan, kota ini juga menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sebagai salah satu kota yang paling padat di Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh memikul beban fungsi yang semakin kompleks dan terus berusaha mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan perkotaan yang ada. Salah satunya yaitu pemerintah Kota Banda Aceh mulai mencanangkan konsep *smart city* sejak tahun 2010, tepatnya 5 tahun setelah terjadinya gempa dan tsunami.

Beberapa inisiatif telah dilakukan dalam rangka menuju “*Banda Aceh Smart City*”, antara lain yaitu pengembangan aplikasi di bidang transportasi, kesehatan, pendidikan, tata ruang, lingkungan, pelayanan publik, dan kebencanaan. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung *smart city* juga dilakukan seperti penyediaan koneksi internet gratis di tempat-tempat publik, penyediaan monitor

cctv, dan secara bertahap melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Saat ini telah tersedia 27 aplikasi dan mulai muncul tata kelola yang berbasis pada *smart city*.

Pendekatan konsep *smart city* di Kota Banda Aceh dimulai dari gagasan menciptakan “Banda Aceh Islamic Cyber City”, dengan tujuan utama agar dapat menciptakan Kota Banda Aceh yang islami dan modern. Secara khusus, konsep *Islamic cyber city* diciptakan untuk dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tercapainya Kota Banda Aceh sebagai bandar wisata islami, meningkatkan kualitas pendidikan melalui adanya akses informasi, mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien melalui pemanfaatan *e-Government*, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Sejauh ini, pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan pengembangan 26 jenis aplikasi sistem informasi yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.6 Aplikasi Sistem Informasi Kota Banda Aceh (IT Master Plan Pemerintah Kota Banda Aceh, 2010-2014).

No	Nama	SKPD Pengelola	Keterangan	Status
1	SIPESAT	Kantor Pelayanan Terpadu	Mengelola Izin SITU dan IUJK	Digunakan
2	SIMSATU	Kantor Pelayanan Terpadu	Mengelola semua bentuk perijinan dan non perijinan	Tidak Selesai
3	MAPATDA	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Manajemen Pendapatan Daerah	Digunakan
4	GDO	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Data Gaji Pegawai	Digunakan
5	SIPKD	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penatausahaan Keuangan	Pengembangan
6	SIMBADA	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Aset	Pengembangan
7	SIKAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Menyimpan Data Penduduk	Digunakan

No	Nama	SKPD Pengelola	Keterangan	Status
8	SIMPUS	Dinas Kesehatan	Data Pelayanan Kesehatan / SP2TP	Digunakan dan Pengembangan
9	SDTK	Dinas Kesehatan	Data Pelayanan Kesehatan / SP2TP	Digunakan dan Pengembangan
10	SIMPEG	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan, RSUD Meuraxa	Menyimpan data pegawai	Digunakan dan proses input data
11	Agenda	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan	Menyimpan data surat dan dinas	Digunakan
12	ADPEG	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan	Memberikan data layanan administrasi kepegawaian	Pengembangan
13	SIMAK BMN	Komisi Pemilihan Umum	Input data barang APBN	Pengembangan
14	Aplikasi RKA dan DPA	DISPERINDAGK OP dan UKM	Penyusunan RKA & DPA	Pengembangan tahun depan
15	Bursa Kerja online Kota Banda Aceh	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Informasi untuk pencari kerja	Digunakan
16	SIPKD	Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian, Kantor Lingkungan Hidup	Data Keuangan, pembuatan RKA dan DPA	Digunakan dan Pengembangan
17	Biling	RSU Meuraxa	Menyimpan data transaksi kasir dan pelaporan	Pengembangan
18	Rekam Medik	RSU Meuraxa	Menyimpan data transaksi Rekam Medik dan pelaporan	Pengembangan
19	Apotik	RSU Meuraxa	Menyimpan data stok obat dan pelaporan	Pengembangan
20	Anjungan Informasi Mandiri	RSU Meuraxa	Media Informasi masyarakat mengenai rumah sakit	Digunakan

No	Nama	SKPD Pengelola	Keterangan	Status
21	SIPKD	Kantor Perpustakaan dan Arsip	Keuangan	Tidak digunakan
22	SI Pemantauan UKL / UPL	Kantor Lingkungan Hidup	Untuk mengetahui kegiatan / usaha yang sudah memiliki dokumen UKL/UPL dan melaksanakan isi dari dokumen UKL/UPL tsb.	Pengembangan tahun depan
23	Pemetaan tanah aset pemerintah	Bagian Tata Pemerintahan Setda	Untuk mengidentifikasi dan menjaga tanah aset pemerintah kota	Pengembangan tahun depan
24	Sistem Pengarsipan Surat secara elektronik	Bagian Umum Setda	Sistem Pengarsipan Surat secara elektronik	Pengembangan tahun depan
25	JDI	Bagian Hukum Setda		Pengembangan
26	Penomoran Keputusan Walikota	Bagian Hukum Setda	Penomoran Keputusan Walikota	Pengembangan tahun depan

Berdasarkan tabel di atas, terlihat SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan RSUD Meuraxa memiliki jumlah aplikasi terbanyak yaitu 4 buah. Kemudian untuk status dari aplikasi tersebut dominan masih dalam tahap pengembangan. Sangat disayangkan ternyata terdapat aplikasi yang statusnya tidak selesai dan tidak digunakan.

Bila dilihat dari jumlah penggunaan telepon seluler dan komputer, anggota rumah tangga dengan usia lima tahun keatas telah menggunakan telepon seluler dan komputer sebanyak 94,66%, dan sebanyak 85,86% penduduk usia 5 tahun keatas telah menggunakan internet. Hal ini menjadi potensi besar dalam pengembangan konsep *smart city* di Kota Banda Aceh, karena terlihat dari besarnya jumlah penduduk yang telah menggunakan gawai (*gadget*) dalam kehidupan sehari-harinya. Namun dalam mewujudkan salah satu dimensi *smart city* seperti *smart people*, tidak dapat hanya mengandalkan gawai, internet, atau TIK saja, tetapi

dibutuhkan beberapa syarat dan kondisi yang harus dipenuhi sehingga dapat terwujudnya *smart people*. Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam mewujudkan *smart people*, antara lain seperti tingkat kualifikasi masyarakat yang dilihat dari kemampuan berbahasa dan adanya kawasan pusat pengetahuan, seperti adanya universitas, pusat penelitian, dan lain sebagainya.

Pada dimensi *smart economy*, konsep *smart city* Kota Banda Aceh fokus pada peningkatan pelatihan kapasitas pengelolaan manajemen koperasi/KUD, pelatihan akuntansi koperasi bagi pengurus, pelatihan industri kreatif, peningkatan UMKM, dan perluasan industri pariwisata yang ada di Kota Banda Aceh. Beberapa aplikasi yang telah dikembangkan dalam rangka mendukung terciptanya konsep *smart city*, antara lain yaitu: SIMSATU, SPIPSE, Rekom Banda Aceh, Info Harga, Portal industri kreatif, *E-procurement*, dan Portal wisata Banda Aceh.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator yang menunjukkan kondisi perekonomian suatu wilayah. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu pengelolaan dan pengolahan data menjadi lebih efektif dan efisien. Sejalan dengan konsep pengembangan Kota Banda Aceh untuk menjadi *smart city*, pengembangan sistem berbasis aplikasi mulai dilakukan. Beberapa aplikasi yang telah mulai dikembangkan oleh Kota Banda Aceh adalah SIMBADA (Manajemen Aset), SIMKEU, *E-Budgeting* dan SIMAKBMN.

Aplikasi yang telah dikembangkan oleh Kota Banda Aceh bukan berarti telah sempurna, masih terdapat beberapa evaluasi sampai aplikasi tersebut dapat berjalan efektif dan efisien. Beberapa evaluasi tersebut seperti: SIMBADA yang masih memerlukan pengembangan modul; SIMKEU yang masih memerlukan integrasi dengan sistem lainnya; dan SIMAKBMN yang masih memerlukan modul terintegrasi antara keuangan, anggaran dan BMN.

Pada dimensi *smart mobility*, Kota Banda Aceh berfokus pada bidang transportasi yaitu khususnya pada penurunan jumlah kendaraan pribadi, meningkatkan pelayanan di bidang transportasi umum, penekanan jumlah kemacetan, penurunan

jumlah kecelakaan, dan lain sebagainya. Saat ini jumlah kepemilikan kendaraan pribadi di Kota Banda Aceh mulai meningkat secara dramatis sejak ramainya Kota Banda Aceh dengan berbagai aktivitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascakejadian bencana alam gempa dan tsunami pada Desember 2004. Namun, tingkat kemacetan di dalam kota masih cukup minim dan bisa diatasi. Kemacetan hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja, seperti pagi dan sore hari, khususnya pada lokasi-lokasi tertentu seperti di persimpangan lampu lalu lintas.

Salah satu solusinya adalah mempersiapkan moda transportasi umum yang baik dan representatif bagi masyarakat kota di masa depan. Saat ini terdapat beberapa moda transportasi umum dalam kota yang digunakan masyarakat, yaitu bus Trans Kutaraja, bus Damri, dan mini bus labi-labi, serta dilengkapi dengan satu terminal angkutan antar kota dan satu terminal angkutan dalam kota. Namun, karena dianggap belum cukup memadai, maka pemerintah Provinsi Aceh mengeluarkan wacana untuk membangun sistem transportasi massal Mass Rapid Transit (MRT) di pusat ibu kota provinsi, yaitu di Kota Banda Aceh (Republika, 2018). Sistem transportasi massal MRT nantinya diharapkan akan mampu mengangkut 300 penumpang sekali jalan, dan dapat mengurangi jumlah kecelakaan dan kemacetan.

Saat ini, program dan aplikasi pendukung konsep *smart mobility* dalam ketersediaan infrastruktur ICT pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berjumlah 84 aplikasi, dengan jumlah komputer yang digunakan di seluruh pemerintahan kota berjumlah 1337 unit, yang tersebar hingga ke kecamatan dan gampong-gampong yang ada di Kota Banda Aceh. Aplikasi yang dapat diakses oleh publik, sebanyak 51 aplikasi dari 11 SPKD, seperti aplikasi katalog peta, aplikasi e-musrenbang, aplikasi sistem informasi tata ruang, aplikasi penerangan jalan umum (e-LPJU), informasi ketenagakerjaan, sistem pendaftaran akta kelahiran *online*, dan lain sebagainya.

Untuk meningkatkan keamanan dalam berkendara dan menggunakan fasilitas transportasi, maka pemerintah Kota Banda Aceh dan Pihak kepolisian juga telah memberlakukan *System Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dengan

pengawasan kamera CCTV di beberapa titik di pusat kota. Apabila terdapat pelanggaran lalu lintas yang terekam CCTV, maka dikenakan tilang *online* atau disebut juga sebagai e-tilang. Selain itu juga terdapat aplikasi yang dapat diakses secara *online* untuk melihat rute yang ada dan jadwal angkutan umum seperti bus Damri, bus Trans Kutaraja, dan jadwal kapal penyeberangan.

Selanjutnya adalah melihat konsep *smart city* Kota Banda Aceh dari dimensi *smart governance*. Layanan publik merupakan salah satu bidang yang menjadi fokus Kota Banda Aceh. Pemerintah berusaha meningkatkan pelayanan publik melalui program-program peningkatan pelayanan dalam kependudukan, meningkatkan kecepatan proses pelayanan, memberikan kemudahan dalam proses, menekan biaya yang dibutuhkan, dan kesamaan data serta hubungan koordinasi yang baik antar instansi untuk kelancaran proses pelayanan. Salah satunya yaitu melalui program sistem informasi manajemen pelayanan perizinan terpadu satu pintu (SIMSATU).

Aplikasi lainnya yang juga mendukung proses pelayanan publik antara lain adalah: Sistem informasi tagihan pelanggan *online*, pencatatan meter tagihan melalui aplikasi android, Layanan Pengaduan Masyarakat (LPM) berbasis pesan singkat yang menampung informasi atau aduan masyarakat yang ditujukan kepada pemerintahan kota, Open Data yaitu sistem informasi yang berisikan dataset SKPD Kota Banda Aceh, Inong (Informasi Nanggroe) yang memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat dari seluruh SKPD yang ada, sistem *streaming* CCTV keramaian kota atau Banda Aceh Surveilans System (BASS), aplikasi jurnalisme warga Kutaraja (JAWARA) digunakan masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya melalui jurnalistik, dan lain sebagainya

Pemerintah Kota Banda Aceh selama ini menjalankan sistem pemerintahan yang transparan, salah satunya yaitu ditandai dengan rendahnya angka korupsi berdasarkan data dari BPS tercatat ada satu kasus korupsi pada tahun 2017 dan dua kasus pada tahun 2019. Hal ini juga didukung oleh sistem anggaran dan sistem keuangan *online* yang sudah dijalankan selama ini, seperti Sistem Informasi Keuangan Desa (SIMKEUDES), sistem informasi monitoring data keuangan

daerah dan gampong atau OMSPAN, sistem informasi pencegahan penyelewengan dana desa atau SOPEUGAP, *mobile* informasi anggaran Banda Aceh Gemilang (Mi-Abang) yang menyajikan informasi anggaran Kota Banda Aceh melalui versi *mobile*, aplikasi perizinan *online*, layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), sistem informasi *monitoring* pelaksanaan dan evaluasi lelang (SIMPEL), dll.

Terakhir, dimensi *smart living* dan *smart environment* di Kota Banda Aceh difokuskan pada penyediaan fasilitas kebudayaan, kesehatan, keamanan, permukiman, pendidikan, dan wisata. Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh, memiliki beberapa fasilitas museum, khususnya yaitu Museum Tsunami, yang menjadi salah satu kebanggaan Kota Banda Aceh saat ini. Selain itu juga terdapat museum lainnya seperti Museum Aceh dan Museum Gunongan, serta beberapa gedung budaya, salah satunya yang paling dikenal masyarakat Kota Banda Aceh adalah Taman Budaya Aceh.

Bila melihat daya tarik wisata di Kota Banda Aceh, dari sumber Badan Pusat Statistik, maka objek pariwisata dan situs cagar budaya yang paling banyak adalah makam atau kompleks makam, objek wisata sejarah, objek wisata tsunami, dan masjid-masjid bersejarah. Ketersediaan fasilitas wisata seperti akomodasi penginapan dapat dilihat dari banyaknya jumlah hotel dan penginapan yang ada, seperti hotel melati 49 unit, hotel bintang satu 15 unit, hotel bintang dua 9 unit, hotel bintang tiga 7 unit, dan hotel bintang empat dan lima, masing-masing 1 unit.

Dalam melihat tingkat kesejahteraan penduduk, terlihat bahwa jumlah persentase rumah tangga yang menerima bantuan perlindungan sosial adalah sebanyak 12,7%, yang terdiri dari 3,5% program bantuan pangan (BPNT), 4,8% Program Indonesia Pintar (PIP), 1,9% program bantuan Kartu Perlindungan Sosial (KPS), dan 2,52% mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Kondisi *smart environment* di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada rencana tata ruang wilayah kota yang menyebutkan bahwa 70 persen bagian kota adalah lahan

yang dilindungi, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan yang sudah tinggi. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan revitalisasi lingkungan telah mencapai lebih dari 70 persen, meskipun tingkat pencemaran air bersih, pencemaran udara, dan pencemaran sampah di Kota Banda Aceh masih cukup rendah, yakni dibawah 10 persen pencemaran. Meskipun polusi udara, polusi limbah, dan polusi suara yang ada di Kota Banda Aceh masih cukup rendah, namun perlu adanya upaya perlindungan lingkungan melalui berbagai cara, seperti sosialisasi kepada warga dalam meningkatkan kesadaran akan kebersihan, penanaman pohon di lingkungannya masing-masing, pemilahan sampah dan daur ulang sampah, pembuangan sampah yang benar, kesadaran warga dalam menjaga alam, serta penggunaan air dan listrik yang efisien.

Bidang lingkungan juga memiliki sistem pengawasan dan pengendalian kualitas air bersih, kualitas udara dan persampahan, melalui penghijauan dan pembibitan. Penghijauan dan pembibitan di data melalui sistem informasi *E-Tree* yang menunjukkan lokasi dan titik penanaman pohon yang saling terintegrasi. Dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan, maka juga dilakukan pendataan lainnya, seperti juga pendataan titik sebaran pohon, penanaman tanaman hias, dan data inventarisasi ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di Kota Banda Aceh. Dari 90 gampong yang ada di Kota Banda Aceh, semuanya sudah mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah. Proses daur ulang dilakukan melalui sistem Bank Sampah gampong sebanyak 23 unit dengan jumlah nasabah sebanyak 806 orang, Bank Sampah Sekolah sebanyak 27 unit, rumah kompos skala kawasan 2 unit, pabrik daur ulang plastik 1 unit, dan 152 unit rumah tangga pembuat kompos.

IV.5 Kota Banda Aceh dalam Konteks Resiliensi

Kondisi Kota Banda Aceh yang rentan terhadap bencana gempa dan tsunami perlu diantisipasi dengan melakukan upaya pencegahan penanggulangan bencana. Usaha pencegahan dilakukan dalam rangka persiapan menghadapi bencana, siap siaga, dan adanya peringatan dini. Kota Banda Aceh secara khusus melakukan usaha penanggulangan bencana melalui peran dan partisipasi aktif pemerintah dan warga kota. Pemerintah melakukan sinkronisasi prinsip-prinsip penanggulangan bencana

yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di daerah. Pemerintah mengatur dan membuat regulasi tentang kelembagaan yang berwenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Berdasarkan dokumen RPB Kota Banda Aceh tahun 2016-2021, Kota Banda Aceh telah menetapkan visi dan misi dalam hal penanggulangan bencana kota. Visi penanggulangan bencana daerah tentu tidak terlepas dari visi penanggulangan bencana Indonesia dalam mewujudkan ketangguhan menghadapi bencana, sedangkan misinya dapat menyesuaikan secara lebih teknis di daerah.

Visi Kota Banda Aceh dalam menghadapi bencana adalah “Terwujudnya Kota Banda Aceh yang tangguh terhadap bencana dengan budaya sadar bencana dalam mewujudkan Kota Banda Aceh madani”. Visi ini diwujudkan dengan misi penanggulangan bencana, yaitu: 1) adanya penguatan kelembagaan dan regulasi penanggulangan bencana; 2) membangun dan menyelenggarakan sistem penanggulangan bencana yang komprehensif, terpadu dan berkelanjutan; 3) menjalankan pemanfaatan penelitian dan teknologi tepat guna untuk penanggulangan bencana; 4) menjalankan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berbasis pada masyarakat; 5) pengurangan risiko bencana; 6) melakukan peningkatan efektivitas penanganan darurat bencana; dan yang terakhir 7) optimalisasi pemulihan dampak bencana.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang penanggulangan bencana. Lembaga yang khusus menangani penanggulangan bencana di tingkat provinsi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah Kota Banda Aceh yang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2011. BPBD bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi yang adil dan setara, serta melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pada penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD tidak bekerja sendiri, melainkan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya seperti lembaga-lembaga dan instansi terkait lainnya. Selain itu pihak lain yang juga terlibat adalah Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Banda Aceh (Forum PRB - Kota Banda Aceh), yakni sebuah forum independen yang bertujuan mendorong dan memfasilitasi kerja sama banyak pihak sebagai salah satu upaya dalam mengurangi risiko bencana di Kota Banda Aceh.

Tabel IV.7 Peran dan fungsi aktor-aktor dalam upaya penanggulangan bencana (RPB Kota Banda Aceh 2016 – 2021, 2016; BRR, 2009).

No	Pihak/Instansi yang terlibat	Peran dan Fungsi
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan upaya penanggulangan bencana. - Membuat perencanaan dalam upaya pemindahan korban ke wilayah yang aman dari bencana.
2.	Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan dukungan pada perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pembangunan yang sensitif terhadap risiko bencana bersama dinas-dinas terkait lainnya.
3.	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan dalam menyediakan kebutuhan logistik (pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya) serta penyediaan <i>shelter</i> bagi korban bencana.
4.	Dinas Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan perencanaan, pengendalian, dan persiapan lokasi dan jalur evakuasi, perbaikan sarana/prasarana publik, serta fasilitas darurat. - Melakukan koordinasi dalam upaya penyediaan perumahan bagi korban bencana. - Memulai pelaksanaan pembangunan infrastruktur berdasarkan rencana tata ruang daerah yang berketahanan terhadap risiko bencana. - Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan mitigasi seperti: membuat dan merawat kolam tampungan air, rumah pompa, dan drainase.

No	Pihak/Instansi yang terlibat	Peran dan Fungsi
5.	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perencanaan dalam pencegahan, penyuluhan, dan pelayanan kesehatan. - Menyediakan sarana dan prasarana seperti obat-obatan, logistik kesehatan, tenaga medis.
6.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> - Mempersiapkan perencanaan dan pelaksanaan akan kebutuhan transportasi, komunikasi, dan informasi. - Merencanakan dan menyiapkan informasi dan komunikasi dalam hal jalur evakuasi bencana, khususnya bencana tsunami.
7.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan darurat khususnya bagi daerah-daerah yang terdampak oleh bencana. - Melakukan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta menjalankan koordinasi pendidikan yang sadar bencana dan sekolah siaga bencana.
8.	Badan Kesbangpolinmas dan PB	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan fasilitasi terhadap pembauran dalam rangka mewujudkan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana.
9.	Badan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Menjalankan proses pengawasan dan pengendalian, serta penataan hukum lingkungan dalam pencegahan bencana terkait konservasi alam dan lingkungan hidup.
10.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan diklat terkait kebencanaan dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan daerah.
11.	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Mempersiapkan kebutuhan anggaran kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
12.	Disperindag, Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> - Menciptakan program-program usaha kecil dan kegiatan ekonomi produktif bagi warga miskin di daerah-daerah pascabencana untuk mempercepat pemulihan.
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan data dan informasi terkait kependudukan yang dibutuhkan dalam proses penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana.
14.	Badan <i>Search and Rescue</i> (SAR)	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan dukungan dan melakukan koordinasi, serta menjalankan kegiatan pencarian dan penyelamatan.

No	Pihak/Instansi yang terlibat	Peran dan Fungsi
15.	Badan Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan identifikasi terhadap kebutuhan dan melaksanakan pembinaan serta peningkatam kapasitas masyarakat dalam hal ketahanan menghadapi bencana. - Mengadakan pelatihan dalam hal tata cara memenuhi kebutuhan hidup pada saat terkena bencana.
16.	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan perencanaan dan pengendalian dalam hal mitigasi bencana tsunami dan abrasi pantai.
17.	RSU Meuraxa	<ul style="list-style-type: none"> - Berperan dalam membantu pelayanan kesiapsiagaan, dan mitigasi. - Memberikan pelayanan kesehatan pada tingkat dasar dan lanjutan.
18.	Forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana) Kota Banda Aceh.	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pemerintah daerah pada saat melakukan konsolidasi dan pengawasan. - menjalankan advokasi dan pendekatan politis pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan PRB.
19.	Sektor swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun kemitraan antara pemerintah dan swasta untuk menciptakan upaya perlindungan perekonomian pascabencana. - Pengurangan risiko bencana, dari segi perekonomian dan sektor industri.
20.	Lembaga pendidikan, Lembaga penelitian, dan perguruan tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan strategi pendidikan dan penyadaran dalam bentuk informasi yang bertujuan mengurangi risiko bencana. - Pemanfaatan hasil penelitian terapan baik dari perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga penelitian yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. - Mengembangkan hasil penelitian yang dapat diaplikasikan langsung oleh individu dan keluarga seperti pembangunan rumah anti gempa, pembangunan sumur resapan, dll. yang bertujuan untuk dapat menurunkan kerentanan terhadap risiko multi bahaya. - Menjalankan pendidikan dan pelatihan tentang pentingnya upaya pengurangan risiko bencana.

Halaman ini sengaja dikosongkan